



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

JL. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA
KAB. BANYUASIN
TELP/FAX. (0711) 5723669

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II dapat menyusun "RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2020-2024", yang merupakan tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Renstra ini merupakan acuan dalam merencanakan, merumuskan dan menyusun program kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode 2020 – 2024.

Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari *stakeholders* dan instansi sektor terkait lainnya dalam lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta jajarannya. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Renstra (Rencana Strategis) 2020-2024 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan jajarannya.

Pangkalan Balai, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	II
Daftar Isi	III
Bab I Pendahuluan	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
Bab II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	
3.1 Arah Kebijakan dan strategi Mahkamah Agung	9
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri	10
Pangkalan Balai	
3.3 Kerangka regulasi	13
3.4 Kerangka Kelembagaan	14
Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	24
Bab V Penutup	28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Table 01	Sumber Daya Manuasia Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	3
Table 02	Sumber Daya Manuasi Tenaga Honorer (PPNPN)	3
Table 03	Kerangka Regulasi	14
Table 03	Sasaran Strategis 2020-2024	24
Table 04	Matriks Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	30

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 01	Halaman Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	7
Gambar 02	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	23

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

A. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah tenaga Hakim dan Pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dinilai masih sangat kurang, dan juga jumlah Hakim yang kurang sebanding dengan beban Perkara Pidana dan Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dari tahun ketahun.

Adapun jumlah Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sampai dengan bulan Januari 2022 adalah 34 (tiga puluh empat orang), sedangkan untuk honorer ada 8 (delapan orang) yang terdiri dari :

1. Hakim : 8 (Delapan) orang
2. Pejabat Struktural : 8 (Delapan) orang
3. Pejabat Fungsional : 9 (Sembilan) orang
4. Pelaksana : 9 (Sembilan) orang
5. Honorer (PPNPN) : 8 (Delapan) orang

- Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	GOL/ RUANG
1	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Ketua	IV/a
2	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	IV/a
3	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/c
4	M ALWI, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/c
5	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/b
6	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/b
7	AGEWINA, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/b
8	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a
9	YUSUF, S.H.	Panitera Tingkat Pertama	III/d
10	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	III/d
11	A HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
12	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	III/d
13	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H	Panitera Muda Pidana	III/b

NO	NAMA	JABATAN	GOL/ RUANG
14	DWI INDAH ROSALINA, S.H, M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	III/c
15	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan	III/c
16	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	III/b
17	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	III/c
18	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/c
19	FITRIANI, S.H	Panitera Pengganti	III/b
20	BRENDY SUTRA, S.H	Panitera Pengganti	III/b
21	SUWARMAN, S.H ., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
22	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	III/b
23	MATHYAS ADINATA, S.H.	Panitera Pengganti	III/b
24	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	III/a
25	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita Pengganti	III/a
26	ENDANG AZHARI	Bendahara Tingkat Pertama	III/b
27	MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
28	MUTIARA SAPUTRI, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia	III/a
29	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
30	ZULPAN ARYANTO	Pengadministrasian Persuratan	II/d
31	ERA USTHI ANGGRAINI	Pengadministrasian Registrasi Perkara	II/d
32	DESTI DWI AMANDA, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c
33	DEA ANGGITA, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	II/c
34	ADE KURNIAWAN, A.MD.	Pengadministrasian Registrasi Perkara	II/c

Table 1 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

- Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERWANZA	Satpam	PPNPN
2	FAISAL RIFA'I, A.Md	Sopir	PPNPN
3	ABDUL HADI	Pramubakti	PPNPN

NO	NAMA	JABATAN	KET
4	M. FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	PPNPN
5	M. RAMADHONI, S.H.	Sopir	PPNPN
6	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	PPNPN
7	TITAH ADELIA ROSY, S.H.	Pramubakti	PPNPN
8	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	PPNPN

Table 2 Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dari Analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dipetakan kembali melalui analisa SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan aktor *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humprey dalam sebuah Kongres di Stanford University pada 1960 dan 1970.

A. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sumatera-Selatan dan kepulauan Sumatera;
2. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan unsur Forkompinda sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 118-0260 Tahun 2016, Tanggal 16 Februari 2016;
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan

Negeri Pangkalan Balai selaku Pengadilan Tingkat Pertama;

5. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara aturan dan keadaan saat ini untuk tahun 2022 sudah dapat mengusulkan untuk peningkatan kelas peradilan dari kelas II (dua) menjadi kelas IB (satu B).

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana TI;
2. Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan publik;
3. Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;
4. Pelayanan Publik belum maksimal;
5. Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;
6. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya;
7. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut kepaniteraan dan kesekretariatan;
8. Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;
9. Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan

- peradilan;
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 3. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
 4. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru;
 5. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat menjadi motivasi untuk berkembang;

D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Terbatasnya sumber dana;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang ada;

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN
STRATEGIS



BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

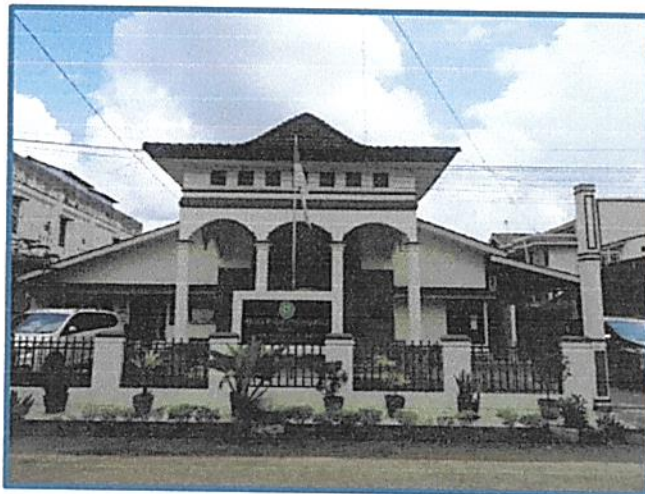
VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

Visi

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Halaman Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

MISI

- **Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan**
- **Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**
- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara.
4. Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut :

1. Terwujudnya prose peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN
DAN STRATEGI



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah

menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding

diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara- perkara perdata umum, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- Sidang keliling/*zitting plaats* dan
- Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

1. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meningkat. 4 (empat) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mewujudkan visi dan misi

yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Indikator kinerja program yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum adalah :

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum
3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum
4. Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi dan PK

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis terhadap peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung layanan peradilan.

3.3.KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGUNG JAWAB	KET
Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara, • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, • Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, • Penambahan volume zitting plaats, posbakum, perkara prodeo • Peningkatan pelayanan publik. • Standardisasi pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo. • Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, • Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, • Juklak/juknis tentang percepatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjen Badium 	

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGUNG JAWAB	KET
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia; 	<ul style="list-style-type: none"> pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Administrasi MA RI 	
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan SK KMA tentang standardisasi pendukung kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Administrasi MA RI 	

Table 3 Kerangka Regulasi

3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

❖ **KETUA DAN WAKIL**

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

❖ **KEPANITERAAN**

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;

- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip

- perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
 - g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

❖ **KESEKERTARIATAN**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- b. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan
- d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 286

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

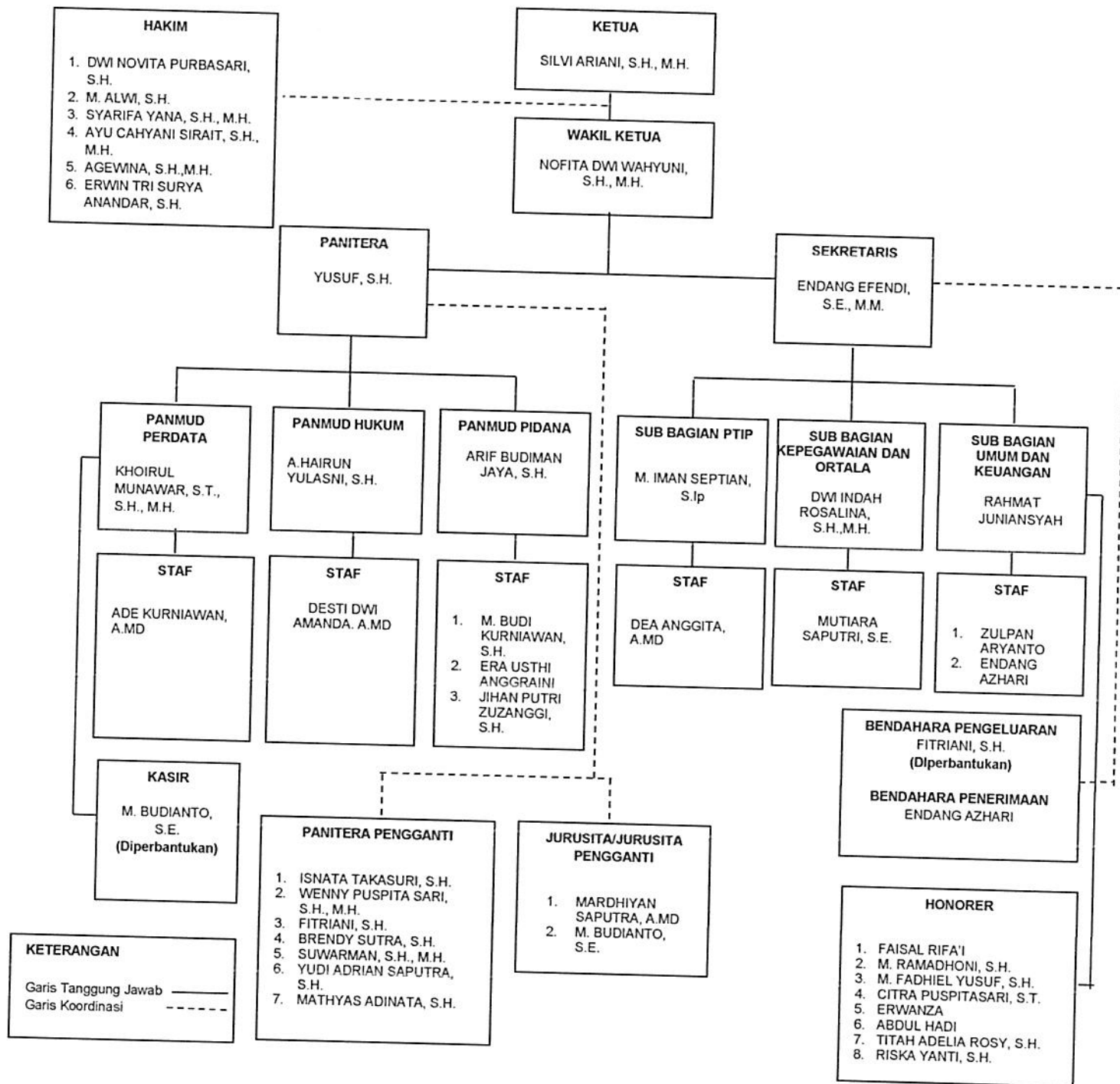
Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**STRUKTUR ORGANISASI
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki 4 program, meliputi :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	85	85	100	100	100
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	85	90	100	100	100
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	80	80	80
		d. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	90	90	90
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93	93	95	95	95
		f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	98	95	95	95

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		g. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	1	10	10	10
		i. Index Kepuasan Pencari Keadlilan	85	85	90	90	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	70	75	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	70	75	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	20	10	10	10
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100	100	100	100	100

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Waktu 1 Hari Setelah Putus					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	100	0	0	0
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	15	0	0	0

Table 4 Sasaran Strategis 2020-2024

Kerangka Pendanaan

Kegiatan 2020:

- DIPA-005.01.2.401909/2020 : Rp. 27.300.884.000,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
- DIPA-005.03.2.402017/2020 : Rp. 183.940.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)

Kegiatan 2021:

- DIPA-005.01.2.401909/2021 : Rp.24.513.366.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- DIPA-005.03.2. 402017/2021 : Rp.73.904.000,- (*tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah*)

Kegiatan 2022:

- DIPA-005.01.2.401909/2022: Rp. 4.986.169.000,- (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)
- DIPA-005.03.2.402017/2022 : Rp. 73.905.000,- (*Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*)

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Selain itu monitoring dan evaluasi perlu dilakukan melalui struktur dan mekanisme yang efektif sehingga indikator-indikator kinerja pada setiap tingkatan dapat dicapai sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan. Persoalan dan

hambatan dapat diketahui sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki pedoman dalam rangka pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi, misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan aparatur negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan lebih terarah, efisien, efektif, akuntabel, dan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat.

MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Visi : Terwujudnya PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan	Perentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Perentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	85	85	100	100	100
2.					Perentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	85	90	100	100	100
3.					Perentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	80	80	80
4.					Perentase perkara pidana yang	100	100	90	90	90

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
5.			%		Indikator Kinerja diselesaikan tepat waktu					
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93	93	95	95	95
6.					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	98	95	95	95
7.					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100
8.					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	1	10	10	10
9.					Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	90	90	90

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	70	75	100	100	100
11.					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	70	75	100	100	100
12.					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	20	10	10	10
13.					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Uraian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja					2020	2021	2022	2023	2024
14.			%			Tepat Waktu	100	100	100	100	100
						Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
15.	Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	100	0	0	0	
16.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zittingplat ²			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0	
17.		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100	100	100	100	100	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
18.	Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan	(isi manual)	100 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10	15	0	0	0
					Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)					

LAMPIRAN





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/1/KP.04.6/II/2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LKJIP /LAPTAH/ IKU/ RENSTRA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang

- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
- b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LKjIP/LAPTAH/IKU/RENSTRA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W5-U10/1/KP.04.6/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	5
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2.	YUSUF, S.H.	Panitera	Ketua Tim	
3.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Anggota	
8.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

PENGADILAN NEGERI KETUA
PANGKALAN BALAI



SILVARTANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 Jl. HM. Asyik Aqil KM 16 Kelurahan Sukajadi
 Kecamatan Talang kelapa Kab. BANYUASIN

DATA JUMLAH PERKARA
 DALAM TAHUN 2021
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	PERKARA PIDANA BIASA / ANAK	JUMLAH		KET
		BIASA	ANAK	
1	2	3	4	5
1	Sisa Tahun 2020			
2	Masuk tahun 2021	115	-	
3	Putus Tahun 2021	502	22	
4	Sisa Tahun 2021	521	22	
5	Banding Tahun 2021	96	-	
6	Kasasi Tahun 2021	22	1	
7	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2021	17	-	
8	Grasi Tahun 2021	-	-	

No.	PERKARA PIDANA CEPAT / SINGKAT / LALU LINTAS / PRAPERADILAN	JUMLAH				KET
		CEPAT	SINGKAT	LL	PRAPID	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Tahun 2020	-	-	-	-	-
2	Masuk tahun 2021	10	-	2201	7	
3	Putus Tahun 2021	10	-	2201	7	
4	Sisa Tahun 2021	-	-	-	-	

No.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2020	22	
2	Masuk tahun 2021	33	
3	Putus Tahun 2021	41	
4	Sisa Tahun 2021	14	
5	Banding Tahun 2021	12	
6	Kasasi Tahun 2021	7	
7	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2021	-	
8	Eksekusi Tahun 2021	-	

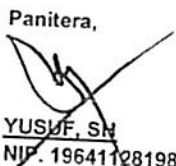
No.	PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2020	1	
2	Masuk tahun 2021	31	
3	Putus Tahun 2021	30	
4	Sisa Tahun 2021	2	

No.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2020	1	
2	Masuk tahun 2021	27	
3	Putus Tahun 2021	27	
4	Sisa Tahun 2021	1	

Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,


SILVIARIAM, SH, MH
 NIP. 197609292001122006

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021

Panitera,

YUSUF, SH
 NIP. 196411281985031005

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus
Perkara Pidana

No.	Jenis Pekara	Sisa Pekara Tahun 2020	Jumlah Sisa Perkara yang diputus
1.	Pidana Biasa	115	115
2.	Pidana Anak	-	-
3.	Pidana Singkat	-	-
4.	Pidana Cepat	-	-
5.	Praperadilan	-	-
6.	Lalulintas	-	-

Perkara Perdata

No.	Jenis Pekara	Sisa Pekara Tahun 2020	Jumlah Sisa Perkara yang diputus
1.	Perdata Gugatan	22	22
2.	Perdata Bantahan	-	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	1
4.	Perdata Permohonan	1	1

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
Perkara Pidana

No.	Jenis Pekara	Perkara Masuk	Perkara yang diputus tepat waktu
1.	Pidana Biasa	502	406
2.	Pidana Anak	22	22
3.	Pidana Singkat	-	-
4.	Pidana Cepat	10	10
5.	Praperadilan	7	7
6.	Lalulintas	2201	2201

Perkara Perdata

No.	Jenis Pekara	Perkara Masuk	Perkara yang diputus tepat waktu
1.	Perdata Gugatan	31	18
2.	Perdata Bantahan	2	1
3.	Perdata Gugatan Sederhana	31	29
4.	Perdata Permohonan	27	26

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Perkara Banding

No.	Jenis Pekara	Sisa Pekara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan banding	Yang tidak mengajukan banding
1.	Pidana Biasa	115	502	521	22	499
2.	Pidana Anak	-	22	22	1	21
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	11	29
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	1	-

Perkara kasasi

No.	Jenis Pekara	Sisa Pekara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan kasasi	Yang tidak mengajukan kasasi
1.	Pidana Biasa	115	502	521	17	504
2.	Pidana Anak	-	22	22	-	22
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	7	33
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	-	1

Perkara Peninjauan Kembali

No.	Jenis Pekara	Sisa Pekara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan PK	Yang tidak mengajukan PK
1.	Pidana Biasa	115	502	521	-	521
2.	Pidana Anak	-	22	22	-	22
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	-	40
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	-	1

4. Jumlah Perkara perdata yang berhasil mediasi

No.	Jenis Pekara	Perkara Masuk	Perkara yang berhasil di mediasi	Nomor Perkara
1.	Perdata Gugatan	33	1	25/pdt.G/2021/PN Pkb

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil diversi

No.	Jenis Pekara	Perkara Masuk	Perkara yang berhasil di mediasi
1.	Pidana Anak	22	3

Perkara Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan banding	Putus	dicabut	Belum diputus
1.	Pidana Biasa	115	502	521	22	19	1	2
2.	Pidana Anak	-	22	22	1	1	-	-
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	11	9	1	1
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	1	-	-	1

Perkara kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan kasasi	Putus	dicabut	Belum diputus	Tidak memenuhi syarat formil
1.	Pidana Biasa	115	502	521	17	5	-	10	2
2.	Pidana Anak	-	22	22	-	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	7	-	-	7	-
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	-	-	-	-	-

Perkara Peninjauan Kembali

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Yang mengajukan PK	Putus	dicabut	Belum diputus
1.	Pidana Biasa	115	502	521	-	-	-	-
2.	Pidana Anak	-	22	22	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	22	31	40	-	-	-	-
4.	Perdata Bantahan	-	2	1	-	-	-	-



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 3112 /SEK/OT 01.1/12/2021
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Jakarta, 13 Desember 2021

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala / Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
di
Tempat

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun dokumen, sebagai berikut:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Penyusunan laporan Kinerja Tahun 2021 untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui website Mahkamah Agung (<https://www.mahkamahagung.go.id/id>) dengan memilih aplikasi internal KOMDANAS atau melalui link Komdanas (<http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>) dengan menggunakan username dan password Komdanas masing-masing satuan kerja. Aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung diakses pada menu Perencanaan/ e-Sakip. User manual atau buku panduan aplikasi e-Sakip dapat diunduh dalam aplikasi Komdanas.

Dokumen-dokumen SAKIP tersebut dikirimkan paling lambat tanggal **28 Februari 2022** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan dokumen SAKIP dalam bentuk hardcopy kepada Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi serta mengunggah dokumen tersebut (berbentuk PDF) ke dalam e-Sakip reviu Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI serta dipublikasikan dalam website masing-masing satuan kerja;

2. Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan dokumen SAKIP kepada Pengadilan Tingkat Bandingnya, mengunggah dokumen tersebut (berbentuk PDF) ke dalam c-Sakip revidi Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI serta dipublikasikan dalam website masing-masing satuan kerja.

Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, agar dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, (kontak person Ibu Yovi Silvani: 085263461949; Bapak Rizqi Widi Feirdani: 081297154842).

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 TELP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Website : www.pt-palembang.go.id Email : renprog.ang.ptplg@gmail.com

PALEMBANG

Palembang, 27 Desember 2021

Nomor : W6-U/5003 /OT.01.2/XII/2021

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal tersebut pada pokok surat serta dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta kepada setiap satuan kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyusun dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022, dan 2023;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Tahun 2022;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 untuk Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung RI yang dapat diakses melalui Website Mahkamah Agung RI (<https://mahkamahagung.go.id/id>) dengan memilih aplikasi internal Komdanas atau melalui link Komdanas (<http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>) dengan menggunakan *username* dan *password* Komdanas masing-masing satuan kerja. Aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung RI diakses pada menu Perencanaan / e-Sakip. User Manual atau buku panduan aplikasi e-Sakip dapat diunduh dalam aplikasi Komdanas.

Selanjutnya diminta kepada setiap satuan kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang agar mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy* ke Pengadilan Tinggi Palembang dan *softcopy* melalui *email* renprog.ang.ptplg@gmail.com paling lambat tanggal 2 Februari 2022 dan mengunggah dokumen-dokumen tersebut kedalam e-Sakip reuiu Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI dan dipublikasikan dalam website masing-masing satuan kerja.

Demikian kami sampaikan dan untuk dilaksanakan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Dr. KRESNA MENON, S.H., M.Hum. /u
NIP. 19570723 198303 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di - Jakarta;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta.

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (01)
 UNIT KERJA (401909)
 ALOKASI Rp.4,986,169,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

MAHKAMAH AGUNG
 Badan Urusan Administrasi
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,986,169,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,976,169,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		4,976,169,000	
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
051	Layanan Umum	1.0 Layanan		5,000,000	
A	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
522192	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			5,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,971,169,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			3,699,977,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			32,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	28,425	28,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			100,174,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			28,683,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,944,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,259,218,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (01)
 UNIT KERJA (401909)
 ALOKASI Rp.4,986,169,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
 MAHKAMAH AGUNG
 Badan Urusan Administrasi
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,271,192,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>399,808,000</i>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			361,257,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			11,551,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	11,551,000	11,551,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			27,000,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	900,000	27,000,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>279,630,000</i>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.160-Sekayu)			60,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (01)
 UNIT KERJA (401909)
 ALOKASI Rp. 4,986,169,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
 MAHKAMAH AGUNG
 Badan Urusan Administrasi
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman: 3

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon			9,000,000	RM
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	750,000	9,000,000	RM
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Web Hosting	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
C	Pemeliharaan Kantor	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	RM
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan gedung dan Bangunan			324,734,000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Tambahan BBM Sewa Roda 4	2496.0 M2	76,300	190,444,000	RM
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
D	Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor	5.0 UT	730,000	3,650,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu) - Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai/Non Hakim [33 ORG x 1 STEL]	33.0 STEL	600,000	19,800,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	RM
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM			136,080,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 org x 12 bln]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	RM
F	PENCEGAHAN COVID			5,000,000	

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (01)
 UNIT KERJA (401909)
 ALOKASI Rp. 4,986,169,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

MAHKAMAH AGUNG
 Badan Urusan Administrasi
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman: 4

(1)	(2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu) - Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	RM
H	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu) - Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu) - Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 7 KEG] - Transportasi [4 ORG x 1 PP x 7 KEG] - Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 7 KEG]	56.0 OH 28.0 OK	300,000 100,000	16,800,000 2,800,000	RM
I	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA	28.0 OH	350,000	9,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu) - Transportasi [2 ORG x 1 PP x 9 KEG] - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 9 KEG] - Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 9 KEG]	18.0 OK 36.0 OH 18.0 OH	100,000 300,000 350,000	1,800,000 10,800,000 6,300,000	RM
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			10,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	2.0 Unit		10,000,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	Pengadaan Alat Pengolah Data			10,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Printer	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2021



Endang Efendi
 NIP 198409132009041002

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (03)
 UNIT KERJA (402017)
 ALOKASI Rp.73,905,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
 MAHKAMAH AGUNG
 Ditjen Badan Peradilan Umum
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman: 1

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			73,905,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73,905,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]			49,905,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN	120.0 Perkara			
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	120.0 Perkara		49,905,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			49,905,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,996,000	U
521211	Belanja Bahan			9,996,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			996,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara				RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	120.0 PKR	8,300	996,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Alat Tulis Kantor				
052	Penetapan hari sidang	120.0 PKR	75,000	9,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,000,000	U
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)				
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	200.0 OK	70,000	14,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,270,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			5,270,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.0 OK	20,000	1,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			4,270,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan				
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	61.0 OK	70,000	4,270,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			15,500,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.0 OK	30,000	1,500,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)				
056	Minutasi/Upaya hukum	200.0 OK	70,000	14,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	U
521211	Belanja Bahan			3,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			3,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara				
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	120.0 PKR	25,000	3,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,005,000	U
				1,005,000	

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (03)
 UNIT KERJA (402017)
 ALOKASI Rp.73,905,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
 MAHKAMAH AGUNG
 Ditjen Badan Peradilan Umum
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : 2

(1)	(2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman Salinan Putusan	10.0 PKR	30,000	300,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa - Pemberitahuan Putusan Banding	5.0 PKR 5.0 PKR	70,000 71,000	350,000 355,000	RM
058 A	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			1,134,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	6.0 PKR 5.0 PKR	64,000 70,000	384,000 350,000	RM
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	240.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	240.0 Orang		24,000,000	
051 A	Pos Bantuan Hukum TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	U
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu) - Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2021



Erdang Efendi

NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24,513,366,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,693,741,000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		4,688,741,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,688,741,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,454,678,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			26,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	22,509	22,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			100,174,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			28,683,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,944,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,259,218,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			182,814,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 24,513,366,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN	6,540,000 6,540,000 116,565,000	6,540,000 6,540,000 116,565,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			988,770,000	
A	Keperluan Perkantoran Sehari-hari			274,320,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	12.0 OB 24.0 OB 60.0 OB 1.0 OB 2.0 OB 5.0 OB	2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000	27,960,000 55,920,000 139,800,000 2,330,000 4,660,000 11,650,000	RM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu) - Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	900,000	27,000,000	RM
B	Langganan Daya dan Jasa			279,630,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu) - Web hosting - Lisensi Vidio Conference - Langganan Internet - Tambahan Langganan Internet	1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN	4,000,000 3,000,000 156,000,000 30,000,000	4,000,000 3,000,000 156,000,000 30,000,000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
C	Pemeliharaan Kantor			171,650,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			119,250,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	800.0 M2	149,063	119,250,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			52,400,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 THN	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000	
	- Perawatan Komputer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UNIT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UNIT	300,000	1,500,000	
D	Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor			72,040,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu)			50,040,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			22,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [30 ORG x 1 STEL]	30.0 STEL	600,000	18,000,000	
E	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			29,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			29,400,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 7 KEG]	56.0 OH	300,000	16,800,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 7 KEG]	28.0 OK	100,000	2,800,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 7 KEG]	28.0 OH	350,000	9,800,000	
F	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA			18,900,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			18,900,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 9 KEG]	18.0 OK	100,000	1,800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 9 KEG]	36.0 OH	300,000	10,800,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 9 KEG]	18.0 OH	350,000	6,300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G 521119	Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu) - Tes Urin [45 ORG x 1 KEG]	45.0 ORG	150,000	6,750,000 6,750,000	RM
H 522141	Hak Keuangandan Fasilitas Hakim Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 ORG x 1 THN]	9.0 OT	15,120,000	136,080,000 136,080,000	RM
1066.EAC	Layanan Umum[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 Layanan		5,000,000	
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1.0 Layanan		5,000,000	
052	Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
A	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	RM
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			19,819,625,000	
1071.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	3.0 unit		1,331,160,000	
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan		1,331,160,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			25,000,000	
A	Pengadaan Lanjutan PC Kepaniteraan			25,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan PC Kepaniteraan	2.0 Unit	12,500,000	25,000,000	RM
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			1,306,160,000	
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1,306,160,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 set	1,306,160,000	1,306,160,000	RM
1071.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 unit		18,488,465,000	
1071.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		18,488,465,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			18,488,465,000	
A	Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Satker Baru			18,488,465,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu) - Fisik	1997.0 m2	8,682,556	17,339,064,000	RM
	- Perencana	1.0 keg	146,905,000	146,905,000	
	- Pengawas	1.0 keg	786,496,000	786,496,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 keg	216,000,000	216,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 16 Desember 2021



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.73,904,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			73,904,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73,904,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	100.0 Perkara		49,904,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.073	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Palembang	100.0 Perkara		49,904,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			10,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			10,000,000	
521211	Belanja Bahan			10,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Penggandaan dan penjilitan berkas	100.0 PKR	10,000	1,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			9,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat tulis kantor	100.0 PKR	90,000	9,000,000	
052	Penetapan Hari Sidang			14,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman penetapan hari sidang	200.0 OK	70,004	14,000,000	
054	Minutasi/Upaya Hukum			3,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
521211	Belanja Bahan			3,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)			3,000,000	
	- Penggandaan dan penjilitan berkas perkara	100.0 PKR	30,000	3,000,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			15,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,500,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [50 OK]	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			5,270,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,270,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	50.0 OK	20,000	1,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,270,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	61.0 OK	70,000	4,270,000	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			1,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,000,000	

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (03)
 UNIT KERJA (402017)
 ALOKASI Rp.73,904,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

MAHKAMAH AGUNG
 Ditjen Badan Peradilan Umum
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman: 2

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman berkas banding	10.0 PKR	30,000	300,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan putusan banding kepada jaksa/terdakwa - Pemberitahuan proses banding kepada jaksa/terdakwa	5.0 PKR 5.0 PKR	70,000 70,000	300,000 350,000	RM
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			350,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,134,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman berkas kasasi dan Peninjauan kembali	5.0 PKR	80,000	400,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum - Pemberitahuan proses kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	6.0 PKR 5.0 PKR	64,000 70,000	400,000 384,000	RM
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	40.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	40.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Jasa konsultan [1 ORG x 2 JAM x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 11 Januari 2022



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.27,300,884,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			3,470,635,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			3,470,635,000	
1066.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,470,635,000	
1066.994.001	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
001	Tanpa Sub Output			3,470,635,000	
A	Gaji dan Tunjangan			2,604,233,000	
511111	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2,604,233,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>			898,529,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	696,743,000	696,743,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	100,893,000	100,893,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	100,893,000	100,893,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>			24,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>			83,947,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	71,953,000	71,953,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,997,000	5,997,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,997,000	5,997,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>			26,949,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	23,099,000	23,099,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,925,000	1,925,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,925,000	1,925,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>			28,140,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>			917,980,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	786,840,000	786,840,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	65,570,000	65,570,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	65,570,000	65,570,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>			142,575,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	122,207,000	122,207,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,184,000	10,184,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	10,184,000	10,184,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.27,300,884,000

Halaman : 2

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	78,141,000	78,141,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	351,648,000	351,648,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	65,400,000	65,400,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,450,000	5,450,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,450,000	5,450,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			866,402,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			278,130,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honor pegawai tidak tetap [8 ORG x 13 BLN] [8 ORG x 13 BLN]	104.0 OB	2,330,000	242,320,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja barang operasional lainnya	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK,bahan cetakan, alat rumah tangga,dll)	1.0 THN	33,810,000	33,810,000	RM
B	<i>Langganan daya dan Jasa</i>			247,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Internet	1.0 THN	156,000,000	156,000,000	RM
	- Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			153,650,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Perawatan	800.0 M2	149,063	119,250,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.27,300,884,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)	
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)		
523121	Gedung, Pemeliharaan Jaringan)	800.0 M2	149,063	119,250,000	RM	
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			34,400,000		
	- Perawatan AC [6 UNIT x 1 THN] [6 UNIT x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000		
	- Perawatan Laptop	5.0 UNIT	300,000	1,500,000		
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000		
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000		
	- Perawatan Komputer	4.0 UNIT	300,000	1,200,000		
	- Perawatan Printer	4.0 UNIT	300,000	1,200,000		
	<i>D</i>	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>				
	521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu)				61,600,000
- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] [1 ORG x 12 BLN]		12.0 OB	700,000	8,400,000		
- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] [1 ORG x 12 BLN]		12.0 OB	600,000	7,200,000		
- Honorarium Bendahara [1 ORG x 12 BLN] [1 ORG x 12 BLN]		12.0 OB	650,000	7,800,000		
- Honorarium Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN] [3 ORG x 12 BLN]		36.0 OB	450,000	16,200,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			22,000,000	RM	
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [30 ORG x 1 STEL] [30 ORG x 1 STEL]	30.0 STEL	600,000	18,000,000		
	- Pakaian Dinas Honorar/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL] [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000		
<i>E</i>	<i>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim</i>					
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			50,400,000	RM	
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [3 ORG x 1 THN] [3 ORG x 1 THN]	3.0 OT	16,800,000	50,400,000		
<i>F</i>	<i>Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding</i>					
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			17,600,000	RM	
	- Transport [4 ORG x 1 PP x 11 KEG] [4 ORG x 1 PP x 11 KEG]	44.0 OK	100,000	4,400,000		
	- Uang Harian [4 ORG x 1 HARI x 11 KEG] [4 ORG x 1 HARI x 11 KEG]	44.0 OH	300,000	13,200,000		
	<i>Rakemas</i>			11,312,000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,312,000	RM	
	- Transport Daerah (Panitera, Sekretaris) [2 ORG x 1 KEG] [2 ORG x 1 KEG]	2.0 OK	406,000	812,000		
	- Transport Jakarta (Ketua, Panitera, Sekretaris) [3 ORG x 1 KEG] [3 ORG x 1 KEG]	3.0 OK	512,000	1,536,000		
	- Tiket PP (Ketua, Panitera, Sekretaris) [3 ORG x 1 KEG] [3 ORG x 1 KEG]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000		
	- Uang Saku (Ketua, Panitera, Sekretaris) [3 ORG x 1 KEG x 4 HARI] [3 ORG x 1 KEG x 4 HARI]	12.0 OK	180,000	2,160,000		
	<i>Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA</i>			40,560,000		
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			40,560,000		
- Transport [2 ORG x 1 PP x 12 KEG] [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000			

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.27,300,884,000

Halaman : 4

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
J 521119	- Uang Harian [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG] [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG] - Tambahan perjadi ke KPPN <i>Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba</i> <i>Belanja Barang Operasional Lainnya</i> (KPPN.160-Sekayu)	24.0 OH 1.0 THN	300,000 30,960,000	7,200,000 30,960,000 6,150,000 6,150,000	RM
005.01.02 1071 1071.951	- Tes Urine Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i> Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lokasi : KAB. BANYUASIN	41.0 ORG 1.0 Layanan	150,000	6,150,000 23,830,249,000 23,830,249,000 23,830,249,000	
1071.951.001 052 A 532111	Tanpa Sub Output Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi <i>Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan</i> <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i> (KPPN.160-Sekayu) - PC Komputer untuk Panitera	8.0 UNIT	12,500,000	100,000,000 23,830,249,000 100,000,000 100,000,000	RM
054 A 533111	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan <i>Pembangunan Gedung Baru</i> <i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i> (KPPN.160-Sekayu) - Pembangunan Gedung Baru - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas - Biaya Pengelola Kegiatan	2496.0 M2 1.0 KEG 1.0 KEG 1.0 KEG	8,634,495 918,150,000 983,120,000 277,280,000	21,551,699,000 918,150,000 983,120,000 277,280,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 16 Desember 2021


 Endang Erenji
 NIP 19840912009041002

KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (03)
 UNIT KERJA (402017)
 ALOKASI Rp. 183,940,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

MAHKAMAH AGUNG
 Ditjen Badan Peradilan Umum
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			183,940,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			183,940,000	
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	240.0 Jam Layanan		24,000,000	
1049.003.001	Tanpa Sub Output				
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	tanpa sub komponen			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	
	- Honor Jasa Advokat [1 ORG x 2 JAM x 10 HARI x 12 BULAN] [1 ORG x 2 JAM x 10 HARI x 12 BULAN]	240.0 OJ	100,000	24,000,000	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	550.0 Perkara		159,940,000	
1049.005.UK3	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Palembang				
051	Pendaftaran Berkas Perkara			159,940,000	U
A	tanpa sub komponen			58,850,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			58,850,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	550.0 PKR	10,000	5,500,000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			53,350,000	RM
052	Penetapan Hari Sidang	550.0 PKR	97,000	53,350,000	U
A	tanpa sub komponen			21,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			21,000,000	
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	300.0 OK	70,000	21,000,000	RM
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			24,390,000	U
A	tanpa sub komponen			24,390,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			24,390,000	
	- Konsumsi Makan Terdakwa	513.0 OK	30,000	15,390,000	RM
054	Minutasi dan Upaya Hukum	300.0 OK	30,000	9,000,000	U
A	tanpa sub komponen			16,500,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			16,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	550.0 PKR	30,000	16,500,000	RM
055	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			20,000,000	U
A	tanpa sub komponen			20,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	200.0 OK	30,000	6,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.183,940,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	200.0 OK	70,000	14,000,000	RM
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			14,000,000	U
A	<i>tanpa sub komponen</i>			14,100,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	180.0 OK	20,000	3,600,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	70,000	10,500,000	RM
057	Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama			2,900,000	U
A	<i>tanpa sub komponen</i>			2,900,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman Salinan Putusan	50.0 PKR	30,000	1,500,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/terdakwa - Pemberitahuan Putusan Banding	10.0 OK 10.0 OK	70,000 70,000	700,000 700,000	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			2,200,000	U
A	<i>tanpa sub komponen</i>			2,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	10.0 PKR	80,000	800,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu) - Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/terdakwa/Penasehat hukum - Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	10.0 OK 10.0 OK	70,000 70,000	700,000 700,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 11 Januari 2022


 Eridani Eferdi
 NIP 196409131009041002